

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun belakangan ini kian marak kasus tentang perilaku para wakil rakyat dan para petinggi aparaturnegara yang menggunakan uang yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan hidup masyarakat atau yang lebih kita kenal dengan korupsi. Bahkan lembaga tertinggi negara pun juga melakukan hal tersebut. Korupsi adalah tindakan tidak terpuji yang sangat merugikan bagi negara dan juga rakyat. Kebanyakan yang melakukan tindakan korupsi adalah para pegawai negeri, baik itu dari kalangan sipil hingga para pejabat kepolisian, yang seharusnya mereka mengabdikan untuk kesejahteraan juga kemakmuran hidup masyarakat banyak. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara.

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi yang tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana biasa, namun sudah menjadi kejahatan luar biasa. Hal ini merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi telah menyerang secara luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, dan dikhawatirkan dapat membahayakan stabilitas, keamanan negara dan masyarakatnya, selain itu juga membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah begitu meluas dalam masyarakat, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari segi jumlah kasus yang terjadi, jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana dan dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya sudah merambah ke seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Hal ini melemahkan pertumbuhan investasi dan ekonomi, mengurangi sumber daya yang tersedia untuk tujuan pembangunan manusia, memperdalam tingkat

kemiskinan, merongrong sistem peradilan, dan melemahkan legitimasi negara. Bahkan, ketika korupsi telah mengakar, maka dapat menghancurkan seluruh struktur ekonomi, politik, dan sosial suatu negara. Masalah korupsi merupakan masalah yang mengganggu, dan menghambat pembangunan nasional karena korupsi telah mengakibatkan terjadinya kebocoran keuangan negara yang justru sangat memerlukan danayang besar di masa terjadinya krisis ekonomi dan moneter. Terpuruknya perekonomian Indonesia yang terus menerus pada saat ini mempengaruhi sendi-sendi kehidupan di dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selain di Indonesia, di belahan dunia yang lain pun tindak pidana korupsi juga akan selalu mendapatkan perhatian yang lebih khusus. Fenomena atau gejala ini harus dapat dimaklumi, karena mengingat dampak negative yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang dapat mendistorsi kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan juga terhadap kehidupan antar negara (Ermansyah Djaja, 2009:2-3).

Tuntutan reformasi salah satunya adalah mengagendakan adanya reformasi hukum secara fundamental untuk menghasilkan hukum yang responsif, yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan mengakomodir semua keragaman yang ada dalam masyarakat. Langkah pertama yang dilakukan pemerintah terkait dengan agenda reformasi adalah mengamandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang diikuti dengan beberapa perubahan peraturan Perundang-Undangan yang termasuk didalamnya mengenai pemerintahan daerah dan sistem pemilihan kepala daerah dari yang semula dipilih secara tidak langsung menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat.

Perubahan sistem pemilihan kepala daerah merupakan salah satu usaha pemberdayaan masyarakat dalam bidang pemerintahan dan demokrasi, tetapi pada faktanya pemilihan kepala daerah secara langsung justru malah menjadi peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi bagi yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tersebut.

Dewasa ini dalam beberapa media massa, polisi (dalam hal ini POLRI) dibombardir dengan pemberitaan tentang perilaku anggota polri yang menerima suap. Fenomena suap tersebut, bukanlah hal baru ditubuh polri. Pengertian polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi

dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang dimaksud dengan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum kepolisian.

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2008 menurut Pasal 51 ayat (1) sudah dijelaskan bahwa pengelolaan dana bantuan yang bersumber dari departemen/lembaga/Pemda/Masyarakat yang diterima oleh Kasatker (Kepala Satuan Kerja), baik tingkat pusat maupun kewilayahan, kelengkapan dokumen perwabku (pertanggungjawaban keuangan) disamakan dengan perwabku (pertanggungjawaban keuangan) APBN sesuai dengan kegunaan/atau peruntukannya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian yang mendalam mengenai pengaturan hukum pidana terhadap perilaku anggota POLRI yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DANA PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI PUTUSAN NOMOR: 19/Pid.Sus/PT.TPK.Smg.) ”**.